



**Oleh Jasyanto**

Pemerintah sedang gencar melakukan perbaikan sistem dan mekanisme dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, begitu juga dengan pranata humas yang merupakan corong komunikasi pemerintah yang ada di instansi pemerintah. Pada Era industry 4.0 dan 5.0 ini, transformasi digital menjadi sesuatu yang harus kita terima dan lakukan. Percepatan mengaplikasikan transformasi digital sangat mendukung pencapaian tujuan dari instansi pemerintah, salah satunya dengan penyempurnaan tata kelola dan peningkatan sistem dengan penerapan dan pemanfaatan aplikasi berbasis online.

## Tentang Tugas dan Fungsi Pranata Humas

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, dijelaskan beberapa pengertian terkait jabatan ini. Jabatan fungsional ini ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Jabatan Prahum diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi

Pranata Hubungan Masyarakat atau selanjutnya kita sebut Prahum, adalah jabatan fungsional yang berada dalam koordinasi instansi pembina, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Keberadaan jabatan fungsional ini sudah lama ada bersama dengan fungsional lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

dan kehumasan. Jabaran tugasnya dalam ruang lingkup melakukan pelayanan informasi dan kehumasan mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Tugas seorang Prahum instansi pemerintah adalah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari pemerintah/badan publik, karena hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun, di dalam memberikan informasi, seorang Prahum harus paham dan menguasai isi dan makna Undang-Undang tersebut, terkait jenis Informasi yang Dikecualikan. Ada informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, antara lain: Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum; Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi; Memorandum atau surat antar badan publik; dan Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Di samping itu ada informasi yang wajib tersedia setiap saat di mana informasi ini semuanya harus disampaikan ke masyarakat dengan cepat. Untuk itu diperlukan sistem informasi yang

tersedia terutama saat pandemi Covid-19 untuk memperlancar tugas pegawai yang bekerja dari rumah (Work From Home /WFH). Sistem yang dibangun ini untuk memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat, sehingga termasuk bagian tugas Prahum untuk mengelola substansinya dalam upaya mempertahankan citra positif pemerintah. Untuk itu, peningkatan dan pembinaan jabatan fungsional Prahum sudah harus dilakukan pengembangan tata kelola dan sistem. Dengan banyak sistem yang berbasis teknologi informasi tentu peran prahum akan meningkat dan juga kompetensinya bisa lebih baik lagi.

Dibangunnya sistem informasi mempunyai banyak tujuan, yaitu: menciptakan pengelolaan dan peningkatan peran pejabat fungsional prahum dalam mendukung kinerja instansinya, serta meningkatkan peran public speaking Prahum dalam mendukung Government Public Relation (GPR) instansi berbasis teknologi informasi. Namun permasalahannya, sebagian besar peran jabatan fungsional ini belum optimal dalam mendukung instansi sebagai corong GPR. Di dalam satu instansi saja masih banyak jabatan fungsional Prahum yang belum kompeten melaksanakan tugas dan memahami perannya.

## **Tingkatkan Penguasaan Bidang Teknologi Informasi dan Tata Kelola**

Dalam menyikapi peran dan fungsi pejabat pengelola komunikasi public, dalam hal ini Prahum, banyak sekali keterkaitannya dengan sistem dan tata kelola. Dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun, penerapannya di lapangan kini sudah jauh berbeda jika didasarkan pada peraturan tersebut. Perkembangan teknologi informasi di masa revolusi industri mendorong banyak perubahan pola tata kerja.

Untuk itu, perbaikan tata kelola terkait dengan aturan sudah sangat mendesak harus dilaksanakan, diperlukan lobi politik dalam mendukung keterkaitan dengan kemitraan dan pembuatan aturan yang melibatkan akolaborasi antara KemenPAN&RB, BKN, dan Sekretariat Negara. Sebab, jika tidak segera dirombak, akan menghambat peningkatan peran Prahum di setiap instansi induknya. Kemenkominfo sebagai instansi Pembina harus menjadi motor penggerak utama untuk melakukan percepatan dalam tata kelola

yang sekarang sudah banyak berbasis teknologi informasi.

Berbagai Langkah harus ditempuh. Perlu segera percepatan perubahan peraturan terkait pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Dari segi kesejahteraan, tunjangan fungsional prahum termasuk yang terendah dari jabatan fungsional lainnya seperti peneliti, perekayasa, perencana, pustakawan, dll. Untuk itu perlu memperbanyak pertemuan dan juga pengkajian peraturan tersebut. Bahkan memungkinkan adanya pendampingan konsultan. Dengan keluarnya aturan yang terbaru akan membuat gairah dan implementasi dari peran dan fungsi pejabat fungsional yang semakin meningkat. Banyak peraturan yang harus dibuat dan disesuaikan terkait dengan perubahan peraturan kepegawaian baik peraturan pemerintah maupun peraturan instansi terkait lainnya.

# Artikel

Perlu adanya pembuatan dan implementasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) berbasis online. Untuk penilaian Angka Kredit (AK), saat ini masih menggunakan metode konvensional atau melalui pengajuan berjenjang dari instansi yang mengusulkan langsung atau melalui pengiriman berkas melalui email. Untuk kondisi sekarang sudah saatnya mekanisme ini dievaluasi dan diubah dengan metode digital, salah satunya dengan pembuatan aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi. Ini sangat mendesak apalagi dalam kondisi pandemi saat ini sangat tidak dimungkinkan tatap muka dan pemeriksaan dokumen pemberkasan penilaian secara langsung. Praktisnya, metode online dapat menjangkau lebih luas lingkup pejabat prahum yang ada mulai dari kabupaten/kota, propinsi, Pusat dan kementerian/lembaga, sehingga dari segi waktu dan biaya lebih efektif dan efisien.

Di dalam penilaian jabatan prahum, perlu pembuatan Asesor tim penilai. Hal ini untuk memberikan pengawasan yang baik bagi tim penilai dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra dan pendampingan nantinya. Dengan membuat suatu tata kelola yang baik, penempatan Asesor ini diharapkan dapat menjadi percepatan pengawasan melalui penilaiannya terhadap tim penilai.

Jabatan fungsional ini juga perlu adanya sertifikasi bagi Tim Penilai dan Pejabat Fungsional. Dapat dilaksanakan secara daring. Kondisi sekarang, tim penilai belum mempunyai suatu mekanisme yang diatur dalam tata kelola. Dengan membuat suatu aplikasi dan mekanisme bagaimana menjadikan tim penilai ini mempunyai kompetensi yang baik dan selalu ditingkatkan perlu dilakukan sertifikasi secara rutin dan berkesinambungan. Hasilnya kan menjadikan jabatan fungsional pranata humas ini menjadi rujukan jabatan fungsional nantinya. Hal ini bisa melibatkan Badan Sertifikasi Profesi yang ada.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat fungsional dan Tim Penilai juga sangat dibutuhkan. Setiap jabatan membutuhkan pembinaan dan peningkatan kompetensi yang harus dilakukan secara baik, teratur, dan berjenjang yang jelas dalam suatu tata kelola. Sudah seharusnya Kemenkominfo dalam hal ini Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik dengan Biro Sumber Daya Manusia membuat suatu

aturan baku dan nantinya dituangkan dalam suatu peraturan menteri tentang pengelolaan diklat dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berwenang dalam akreditasi lembaga diklat.

Fungsi diklat online ini untuk mempercepat kenaikan jenjang jabatan dari pejabat fungsional, karena diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam kenaikan jenjang disebabkan belum mengikuti diklat. Pada sistem diklat online ini juga dikembangkan dengan adanya dashboard untuk pimpinan dalam memantau data dari jabatan fungsional pranata humas se Indonesia. Diharapkan nantinya tercipta data profil pejabat fungsional di seluruh Indonesia yang selalu terkini, seiring dengan dikembangkannya kewajiban pelaporan online. Dengan adanya data ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi instansi mengambil kebijakan dan keputusan.

Prahum sangat berperan dalam mendukung kemitraan. Melalui Bakohumas, Prahum harus ditingkatkan perannya menjadi penggerak penyampaian informasi yang cepat, efektif, dan efisien. Caranya, dengan dibuatkan suatu sistem terintegrasi sesama prahum dalam Bakohumas untuk melakukan pola kerja sama dan kemitraan, untuk jangkauan lebih luas. Pembuatan aturan yang akan melibatkan lembaga lain dapat memanfaatkan fungsi anggota bakohumas, sehingga hasilnya akan lebih optimal dan diharapkan saling mendukung dalam implementasinya.

Fungsi strategis GPR sangat dirasakan sekali perannya, di samping jangkauannya yang sangat luas penyampaian materinya juga bisa bervariasi. Salah satu materi yang bisa dijadikan sebagai bahan tayang adalah dengan penampilan game atau permainan edukasi yang penempatannya bisa dilakukan pada saat jadwal penyampaian informasi penting pemerintah, sehingga masyarakat akan selalu mengingat dan mengikuti informasi dari GPR. Untuk lebih memancing semangat, dapat diberikan hadiah hiburan seperti souvenir, dll. Di satu sisi kegiatan ini juga bisa mendorong pegiat gamer maupun mahasiswa dan prahum untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan tujuan akhir bisa mem-branding GPR, menjadi penyampai informasi pemerintah yang handal dan cepat.